

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN LINGGA**

SKRIPSI

Oleh

ERNI

NIM: 16622087

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANS



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN LINGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Seminar Usulan Penelitian dan Penyusunan Skripsi

Oleh

ERNI

NIM: 16622087

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN LINGGA**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Erni
NIM : 16622087

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Ranti Utami, SE.M.Si.A.,CA
NIDN.1004117701 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Meidi Yanto, SE.M.Ak
NIDK. 8804900016 / Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN.1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK
NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN LINGGA**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Erni
NIM : 16622087

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Ranti Utami, SE.M.Si.A..CA
NIDN.1004117701 / Lektor

Sekretaris,



Marina Lidva, S. Pd., M. Pd
NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli

Anggota,



Afrivadi, ST.,ME
NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 03 Desember 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA.
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Erni
NIM : 16622087
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,33
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan
PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Desember 2020

Penyusun,



Erni
16622087

PERSEMBAHAN

*Untuk semua orang yang kusayangi,
Ku persembahkan skripsi ini untuk kalian semua
Terima kasih untuk segala dukungan dan motivasinya*

MOTTO

Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal..

(Bill Gates)

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah

(Imam bin Al Qayim)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

(QS Al Baqarah 216)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis mengucapkan atas kehadiran Allah SWT. karena berkat Rahmat dan limpahan karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LINGGA”**. Maksud dan tujuan penelitian skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE Pembangunan Tanjungpinang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M.ak. Ak. CA, selaku ketua Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA, selaku wakil ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan sekaligus dosen pembimbing satu penulis, yang telah memberikan izin dan kesempatan serta sudah meluangkan waktu untuk membimbing, motivasi, dan membantu serta memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CA, selaku wakil ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku wakil ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Meidi yanto.SE.M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan membimbing guna kesempurnaan Skripsi ini.
7. Ibu Masyitah as sahara, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi
8. Tim penguji seminar usulan penelitian hingga tim penguji siding skripsi dan juga ucapan banyak terima kasih kepada para dosen dan seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan yang telah membantu peneliti selama dalam proses perkuliahan hingga sampai ke sidang skripsi.
9. Bapak H. Isnin Pd.I.,M.Si selaku ketua Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Lingga dan seluruh Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga yang telah membantu memberikan data dan informasi yang penulis perlukan sehingga terelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh Dosen yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
10. Keluarga tercinta yang senantiasa selalu mengarahkan, membimbing dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan doa dan supportnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar.

12. Untuk sahabat terdekat Dwi Pujiastuti, Putri kurniawati, dan Purbo wahyudi, yang telah memberikan supportnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
13. Dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin supaya hasil yang disajikan dalam skripsi ini bisa bermanfaat. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu kritik dan juga saran dari setiap pembaca sangatlah diharapkan guna perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semoga Allah Swt, selalu melimpahkan rahmat dan serta hidaya-Nya dan membalas segala amal kebaikan kepada kita semua amin. Akhir kata dengan kerendahan hati dan keterbatasan kemampuan yang ada serta penuh penghargaan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Tanjungpinang, Desember 2020

Penulis,

Erni

NIM : 16622087

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Ilmiah	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori	8
2.1.1 Akuntansi.....	8
2.1.2.1 Pengertian Akuntansi.....	8
2.1.2.2 Fungsi Akuntansi.....	11
2.1.2.3 Tujuan Akuntansi.....	11
2.1.2 Zakat	14

2.1.2.1	Pengertian Zakat	14
2.1.2.2	Tujuan Zakat	14
2.1.2.3	Fungsi Zakat	15
2.1.3	Akuntansi Zakat.....	17
2.1.3.1	Pengertian Akuntansi Zakat.....	17
2.1.3.2	Tujuan Akuntansi Zakat	20
2.1.3.3	Fungsi Akuntansi Zakat	20
2.1.4	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).....	21
2.1.4.1	Pengertian Laporan Keuangan.....	21
2.1.4.2	Tujuan Laporan Keuangan.....	21
2.1.4.3	Jenis Laporan Keuangan	22
2.1.4.4	Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Satandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 .	24
2.1.4.5	Indikator Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Zakat no 109	34
2.2	Kerangka Pemikiran	35
2.3	Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Jenis Data	40
3.2.1	Data Primer	41
3.2.2	Data Sekunder	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data	41
3.4	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian.....	46
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1.1	Sejarah Singkat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga	46
4.1.1.2	Visi Badan Amil Zakat (BAZNA Kabupaten	

	Lingga	48
4.1.1.3	Misi Badan Amil Zakat (BAZNA Kabupaten Lingga	48
4.1.1.4	Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga	49
4.1.1.5	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga	49
4.1.1.6	Uraian Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga	50
4.1.1.7	Karkteristk Informan	54
4.1.2	Deskripsi Data.....	55
4.1.2.1	Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Lingga	55
4.1.2.2	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana ZIS.	57
4.2	Hasil Penelitian	59
4.3	Pembahasan	60
4.2.1	Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Kabupaten Lingga dengan PSAK NO. 109.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Karakteristik Informan.....	54
Tabel 4.2	Laporan Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Lingga Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018 dan 2019	55
Tabel 4.3	Penerimaan dan Pengeluaran dana ZIS BAZNAS Kabupaten Lingga tahun 2018 dan 2019	58
Tabel 4.4	Ilustrasi Laporan Posisi keuangan	73
Tabel 4.5	Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Amil.....	75
Tabel 4.6	Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Amil	77
Tabel 4.7	Perbandingan Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Kabupaten Lingga dengan PSAK No. 109	79

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	36
Gambar 4.1	Struktur Organanisasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4	Persentase Plagiat
Lampiran 5	Curriculum Vitae

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LINGGA

Erni. 16622087. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
erniopall4@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga dengan PSAK No. 109

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun Indikator penelitian mengesuaikan dengan PSAK No. 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan dan pengukuran Baznas Kabupaten Lingga telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Penyajian dana zakat infak dan sedekah yang disajikan oleh Baznas Kabupataten Lingga sudah sesuai dengan PSAK NO .109 tetapi belum sepenuhnya yaitu pada penyajian laporan keuangan yang di sajikan Baznas Kabupaten lingga masih belum informatif dan tidak menyajikan ke lima laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK NO. 109, Pengungkapan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lingga tidak dapat mengungkapkan kesesuaian yang terjadi keterbatasan informasi dari laporan keuangan yang disajikan Baznas Kabupaten Lingga

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK No. 109

Dosen Pembimbing : 1. Ranti Utami, SE.M.Si.A.,CA

Dosen Pembimbing : 2. Meidi Yanto,SE.M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF ZAKAT ACCOUNTING BASED ON PSAK NO. 109 AT THE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LINGGA

Erni. 16622087. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
erniopall4@gmail.com

This type of research is qualitative research. The types of data used in this study are primary data and secondary data, while data collection techniques use interviews and literature studies. Data processing techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research indicators conform to PSAK No. 109. The results showed that the recognition and measurement in Zakat at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga was in accordance with PSAK No. 109.

The presentation of zakat infaq and alms which is presented by Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga is in accordance with PSAK NO. 109 but not completely, namely

The presentation of financial reports presented by Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga is still not informative and does not present the five financial reports in accordance with PSAK NO. . 109, The disclosure made by Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga cannot reveal the discrepancy that occurs in the limited information from the financial reports presented by Baznas Lingga Regency.

Key Words : *Accounting for Zakat, PSAK No. 109*

Supervisor : 1. Ranti Utami, SE.M.Si.A.,CA

Supervisor : 2. Meidi Yanto,SE.M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat. Angka kemiskinan yang tinggi menjadi masalah evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berbagai kebijakan telah diupayakan tetapi belum efektif untuk menurunkan angka kemiskinan saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada bulan september 2018 sebesar 9,66 persen dari 25,67 juta jiwa. Salah satu upaya zakat berfungsi untuk meminimalkan garis kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Zakat juga merupakan ibadah yang wajib berdimensi sosial yang mempunyai banyak makna dan hikmah baik dalam hubungan sosial maupun pendayagunaan serta pendistribusian zakat secara merata kepada orang-orang Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang – undang no 38 tahun 1999 yang berisi tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama. Pada tahun 2011 ada pembaharuan undang-undang no. 38 tahun 1999 menjadi undang - undang no 32 tahun 2011, zakat dikelola lembaga yang tidak berorientas pada laba yang di perolehnya. Badan Amil Zakat merupakan organisasi sektor publik yang sudah tentu memiliki banyak pihak yang berkepentingan sangat luas. Badan Amil Zakat pengelolaan zakat di atur dalam undang – undang no 38 tahun 1999 yang berisi tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama. Badan Amil Zakat juga

bisa memberikan berbagai informasi terbuka tentang pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada dalam pasal 6 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsi (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (c) pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan sedekah (ZIS). Badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Lingga dibentuk berdasarkan keputusan bupati Lingga pada tahun 2015. Sebelum berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Lingga terbentuklah Badan Amil zakat Daerah (BAZDA) terlebih dahulu.

Hasil laporan yang sudah di proses melalui sistem informasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Lingga, zakat yang sudah terkumpul saat ini sebesar Rp. 54.167.449. masih ada 6 bulan kedepan sehingga kami optimalkan target pengumpulan mencapai 1 miliar untuk tahun ini, serta menghimbau kepada masyarakat Lingga untuk tidak perlu ragu berzakat melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu serta membutuhkan uluran tangan dari para *muzakki*. Terdapat lima program penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lingga yaitu program Lingga dakwah, Lingga ekonomi, Lingga pendidikan, Lingga kesehatan serta Lingga peduli (Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga, 2019).

Penyaluran zakat sangat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga berharap bisa dilaksanakan dengan baik. Di antaranya dilakukan sinkronisasi dengan pemerintah, karena pemerintah juga memberikan bantuan bagi warga tak mampu melalui beberapa program dan serta berharap tidak terdapat monopoli. Dalam penyajian laporan keuangan dengan konsep akuntansi haruslah transparan, jelas dan konsisten sehingga tidak ragu dalam menggunakannya. Sistem akuntansi yang baik berdampak pada pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dimana Badan Amil Zakat Nasional merupakan implementasi dari prinsip dasar yang amanah bertanggung jawab dan transparan dalam mengelolah zakat mendapat kepercayaan dari masyarakat (muzaki) untuk membuat laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut mendapatkan bukti dasar implementasi kinerja yang terpecah dan profesional.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang staf kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga yang dilakukan pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2019 mengatakan: “Bahwa untuk laporan keuangan lembaga amil zakat menjadi salah satu media untuk pertanggung jawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, Ketentuan zakat yang diatur dalam islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan”.

Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donatur (*muzakki* dan *munfiq*) disebabkan belum

transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua *amil* di Indonesia. Lembaga zakat termasuk dalam organisasi publik, yang mana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*, ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat. Dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat”.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa selama ini realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran *muzakki* karena minimnya pengetahuan *muzakki* mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Oktober tahun 2019 di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga, diketahui bahwa hasil pelaporan yang disajikan

oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga tidak memenuhi syarat dalam PSAK nomor 109 dimana penyajian pada PSAK No 109 harus ada neraca atau laporan keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan di dalam laporan keuangan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yaitu belum mencantumkan sumber-sumber pengeluaran dana zakat. Hal ini menyebabkan ketidak sesuaian dengan yang dinyatakan dalam PSAK No 109 pada penyajian dan pengungkapan zakat. Analisis akuntansi zakat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.109), dalam menjalankan system akuntansi zakat, khususnya akuntansi zakat serta menyajikan laporan keuangan dan untuk menambahkan referensi lebih lanjut tentang akuntansi zakat mengenai bagaimana laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ).

Berdasarkan atas fenomena-fenomena yang terjadi, maka penulis berkeinginan menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul : **“Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah meneliti lebih mendalam terhadap judul diatas maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : Apakah Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga telah sesuai dengan PSAK No. 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga dengan PSAK No. 109.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu secara ilmiah dan praktisi yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntansi zakat, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109) dan pada laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi peneliti hendaknya dapat menambah pengetahuan dan dapat menerapkan teori-teori akuntansi zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109. Sedangkan bagi instansi/kantor yang menjadi objek penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerapan akuntansi zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berisikan pendapat/teori, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan data-data yang dihasilkan dari lapangan di analisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan dilakukan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan 2 bagian kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, serta bagian saran yang merupakan suatu bahan masukan yang akan diberikan untuk pihak akademik. Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

Menurut Riyono (2010), akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan rasional.

Akuntansi menyediakan cara-cara untuk mengumpulkan dan melaporkan data ekonomis kepada bermacam-macam pihak yang membutuhkan. Pemilik dan calon pemilik dapat mengetahui bagaimana posisi keuangan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pihak bank atau pemberi kredit dapat menilai kemampuan perusahaan dalam beroperasi yang pada gilirannya mempertimbangkan risiko yang mungkin akan terjadi sebelum pinjaman.

(Harahap, 2011) akuntansi merupakan suatu proses, pengelompokan dan

pengikhtisaran kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

(Effendi, 2013) akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) pada suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Sedangkan (Belkaoui dan Ahmed Riahi, 2011) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan. (Mulyadi, 2010) akuntansi difungsikan sebagai alat mencatat dan menyajikan laporan keuangan untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan.

(Martani, 2012) akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah dan menyajikan data serta berbagai aktifitas yang terkait dengan laporan keuangan. Sedangkan (Effendi, 2013) suatu proses pengidentifikasi, mengukur serta menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif di dalam pengambilan keputusan.

Kemudian menurut Sumarsan (2013) menjelaskan bahwa, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan. Metode pencatatan, penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, diantaranya :

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Kemudian menurut Wahyudin (2010). Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut terkandung kegiatan akuntansi yaitu :

1. Mengidentifikasi

Kejadian ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Pembayaran utang, pembayaran pemebalian tunai, penjualan kredit adalah contoh dari kejadian ekonomi tersebut.

2. Mencatat

Secara historis aktivitas keuangan organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan sesuai kronologi kejadian dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses pencatatan ini, kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkas.

3. Mengkomunikasikan

Kejadian ekonomi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi keuangan organisasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Hery (2011) Fungsi utama dari akuntansi di sebuah perusahaan adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Dari laporan akuntansi dapat melihat perubahan keuangan suatu perusahaan yang terjadi di perusahaan, baik itu rugi ataupun untung. Akuntansi sangat identik dengan perhitungan atau keluar masuknya uang di suatu perusahaan, jadi seorang akuntan harus dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Laporan akuntansi juga berfungsi untuk seorang manager dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar perusahaan tersebut terus mendapat untung besar.

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi

Mulyadi (2010) Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. Untuk mempersiapkan laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pimpinan, manajer, pengambilan kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

Suatu perusahaan membuat sistem akuntansi yang berguna untuk pihak

internal maupun eksternal perusahaan. Tujuan umum dari pengembangan sesuai dengan sistem akuntansi (Mulyadi, 2010) yakni:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha dijalankan selama ini
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk penyajiannya dengan struktur informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan *intern*, akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban suatu organisasi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggung jawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dipertanggung jawabkan.
4. Untuk mengurangi biaya dalam penyelenggara catatan akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomis, untuk memperolehnya

mebutuhkan pengorbanan sumber daya ekonomi lainnya.

(Azhar, 2013) tujuan akuntansi yakni sebagai berikut:

1. Memberikan data dan informasi yang dapat dipercaya.
2. Memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada sumber-sumber ekonomi.
3. Memberikan informasi keuangan yang bisa digunakan memprediksi perusahaan mendapatkan laba.
4. Menyajikan informasi keuangan sedalam mungkin yang berkaitan dengan laporan keuangan sehingga relevan untuk digunakan oleh pengguna laporan.

Sedangkan (Agoes, 2012) tujuan akuntansi secara umum yakni:

1. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva diperusahaan.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada sumber ekonomi perusahaan.
3. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan.
4. Memberikan informasi mengenai perubahan pada sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang serta modal.
5. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut.

2.1.2 Zakat

2.1.2.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan. Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Sedangkan zakat menurut terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Menurut (Suhadi, 2012). Secara bahasa zakat berasal dari akar kata zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Zakat berfungsi sebagai pembersih diri dan harta dari hal-hal yang mengotorinya, membayar zakat akan membuat harta semakin tumbuh berkembang.

2.1.2.2 Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.

2. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tata kelola BAZNAS dan LAZ.
4. Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
5. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
6. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
7. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
8. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

2.1.2.3 Fungsi Zakat

Fungsi Zakat terdapat empat antara lain adalah :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama menjalankan amanah sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah meraih pencapaian menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZNAS provinsi maupun BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS menjadi mitra kerja komisi VIII DPR-RI, BAZNAS tercantum sebagai badan lainnya selain kementerian/lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam laporan kementerian/lembaga pada kementerian keuangan RI.

2.1.3 Akuntansi Zakat

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengakuan nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terbagi tiga yaitu, penyajian informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu menejer dalam alokasi zakat (Pandapotan Ritonga, 2017).

Seorang akuntan zakat dapat memperhatikan dan menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai pedoman. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu Standar bagi pelaku akuntansi berisi prosedur dan peraturan pembuat laporan keuangan dan unsur – unsur akuntansi yang di susun oleh IAI. PSAK dapat membantu akuntansi zakat untuk memastikan penempatan unsur – unsur zakat yang sesuai dengan posisinya. PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat salah satunya yaitu PSAK NO. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

PSAK NO. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yang membuat unsur-unsur zakat dan penyusunan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk transparansi. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan fungsinya, setiap lembaga amil zakat terdapat beberapa perbedaan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah (Pandapotan Ritonga, 2017).

Menurut (Siswanto, Dodik, 2015) Standar Akuntansi Zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK No. 109 akuntansi zakat dan infak/ sedekah, lembaga zakat menggunakan PSAK No. 45 akuntansi nirlaba namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut. Karakteristik tersebut antara lain yaitu pengelolaan dana, penyaluran dana, tujuan penyaluran dana serta jenis dana yang digunakan.

PSAK ini tidak terlepas dari Forum Zakat (FOZ) yang merupakan kumpulan organisasi pengelolaan zakat. Pada awalnya Standar Akuntansi yang digunakan oleh pedoman akuntansi dan keuangan yang dikeluarkan oleh FOZ pada tahun 2005. PSAK No. 109 sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS – IAI) Pada 6 April 2010, untuk meminta fatwa DSAK–IAI menulis surat ke Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK No. 109 dapat ditetapkan. Di dalam PSAK tersebut dapat dijelaskan penerapannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2012.

Kemudian Menurut (Siswanto, Dodik, 2015) ada beberapa pola akuntansi yang berkaitan dengan sistem lembaga zakat antara lain :

1. Zakat Pusat

Zakat yang dibayar di kantor pusat seharusnya didukung oleh akuntansi yang memadai, hal ini untuk memudahkan dalam

pelaporannya. Hal ini juga harus didukung oleh sistem perbankan yang memadai karena untuk mengecek dana yang masuk sehingga memudahkan untuk verifikasinya

2. Cabang Lembaga Zakat

Untuk lembaga zakat yang memiliki cabang sebaiknya rekening bank yang digunakan sama dengan kantor pusat. Hal ini untuk memudahkan dalam pelaporan dan pengecekan saja. Kantor cabang lebih ke arah sebagai pemasaran dan pengembangan potensi di sekitar kantor cabang.

3. Unit Pungutan Zakat (UPZ)

UPZ biasanya digunakan sebagai wakil dari BAZNAS. Sistemnya bisa berbeda dari konsep cabang. UPZ dapat memungut sendiri dana zakat. Namun dapat menggunakannya untuk kepentingan di sekitar UPZ, tentunya ini dengan izin BAZNAS pusat atau daerah. Dana yang dikumpulkan harus di serahkan semua ke BAZNAS pusat atau daerah, jika ada keperluan kegiatan dapat mengajukan proposal. Yang sering terjadi adalah tidak semua dana yang di kumpulkan diserahkan ke BAZNAS krna disebabkan oleh masalah birokrasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, Lembaga zakat harus didukung oleh sistem informasi yang baik pula. Koordinasi antara website dan jaringan dan sistem perbankan akan memudahkan dalam praktek dan pelaporannya. Akuntansi lembaga zakat merujuk pada PSAK No. 109 Akuntansi zakat dan infak/ sedekah. Akuntansi Zakat juga termasuk di dalamnya infak dan sedekah.

Secara umum PSAK No. 109 sudah didukung oleh fatwa MUI sehingga jenis jenis transaksi yang dibolehkan dan dilarang juga sudah sesuai dengan fatwa terkait. Dalam pembuatan PSAK ini juga sudah mengakomodir masukan dari berbagai lembaga zakat yang mempunyai keperluan akuntansi yang berbeda untuk satu jenis transaksi yang sama. Dengan adanya PSAK ini, masalah perbedaan perlakuan akuntansi di lembaga zakat dapat diinimalisir atau malah dapat dicari perbandingan secara umum setelah digunakan.(Siswantoro, Dodik, 2015).

2.1.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat

Adapun tujuan akuntansi zakat adalah untuk :

1. memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.
2. memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

2.1.3.3 Fungsi Akuntansi Zakat

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu:

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat

diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fisabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.

2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.

2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yaitu serangkaian proses pengikhtisaran, pencatatan dan transaksi bisnis pada produk akhir. Seorang akuntansi diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuat. Menurut (HERY, 2015). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan keada pihak – pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan organisasi atau perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan dan kinerja organisasi atau perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan posisis keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut (HERY, 2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan

posisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan untuk organisasi pencari laba (*profit organization*).

2.1.4.3 Jenis Laporan Keuangan

Menurut (HERY, 2015) ada beberapa jenis – jenis laporan keuangan Organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang harus di susun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109 yang meliputi :

1. Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pengelolaan zakat pada saat tertentu. Tujuan di susunnya laporan keuangan ini untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan antara unsur – unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan keuangan dari neraca adalah untuk menilai kemampuan organisasi pengelolaan zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antara transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana

penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

3. Laporan Arus Kas merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.
4. Laporan Perubahan Dana termanfaatkan merupakan laporan Dana termanfaatkan dibuat mengkomodasikan transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.
5. Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjeasan mendetail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Catatan atas laporan keuangan membuat hal-hal berikut informasi umum mengenai lembaga kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kebijakan setelah tanggal neraca.

2.1.4.4 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Merupakan suatu standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.

1. Ruang Lingkup

Pernyataan ini berlaku bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana yang dimaksud amil merupakan organisasi pengelolaan zakat yang pembentukannya bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Pernyataan ini berlaku bagi entitas syariah yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Jika entitas syariah menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, tetapi itu bukan kegiatan utamanya maka entitas tersebut mengacu pada PSAK No 101.

2. Definisi dalam PSAK 109

Beberapa definisi berikut ini digunakan dalam PSAK No. 109 :

- a. Amil adalah entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan undang-undang untuk pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.
- b. Dana amil adalah bagian yang diperuntukkan amil baik dari dana zakat, infak dan sedekah maupun dana lain oleh pemberinya diberikan untuk amil. Dana amil ini digunakan untuk pengelolaan amil.

- c. Dana infak/sedekah adalah dana yang didapatkan dari penerimaan infak dan sedekah.
- d. Dana zakat adalah dana yang dibagikan dari penerimaan zakat.
- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya secara sukarela, kegunaanya bisa ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f. Mustahiq adalah orang maupun entitas yang berhak menerima dana zakat. Terdapat 8 golongan mustahiq yaitu:
 - 1). Fakir
 - 2). Miskin
 - 3). Riqob
 - 4). Orong yang terlilit hutang (ghorim)
 - 5). Muallaf
 - 6). Fisabilillah
 - 7). Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 - 8). Amil
- g. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- h. Nasib adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan zakatnya.
- i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai ketentuan syariah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)

3. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diberikan muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai persyaraan zakat seperti nisab, haul (baik periodik maupun yang tidak periodik). Tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, yang kegunaannya bisa ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberinya. Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelolah yang baik. Dalam hal ini orang yang menerima zakat (mustahik) sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya : fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

4. Pengakuan dan pengukuran zakat

a. Zakat

1. Penerima zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, penerima zakat jika dalam bentuk kas. Dan jika dalam Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Jika terjadi penurunan nilai wajar aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugiannya tersebut. Penurunan aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika kerugian itu tidak disebabkan oleh amil sedangkan kerugian disebabkan oleh kelalaian amil maka penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

2. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan oleh amil kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat. Pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan apabila dalam bentuk nonkas, maka sesuai jumlah tercatat. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah,

kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).

Bagaian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana zakat. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh Ujrah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran. Sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana Zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolah), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai;

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola manfaatnya.

b. Infak/ Sedekah.

1. Penerima Infak/Sedekah

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah, jika dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan dalam bentuk nonkas diakui sebesar nilai wajar aset nonkas. Aset nonkas yang diterima nilai wajarnya ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka ditentukan menggunakan metode nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebagai nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai

pengurang dana infak/sedekah terkait jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera dilasurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penurunan nilai aset Infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana Infak/sedekah, jika terjadi bukan karena kelalaian amil. Jika terjadi karena kelalaian amil maka diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana Infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

2. Penyaluran Infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, sedangkan dalam bentuk aset nonkas maka sebesar nilai yang tercatat atas aset yang diserahkan. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan

untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penentuan Jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

5. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

6. Pengungkapan

a. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi
 - a. Sifat hubungan
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

b. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
2. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase

dari seluruh penerima infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

5. Hasil yang diperoleh dari hasil pengelolaan yang dimaksud tersebut (d) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolah, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terkait dan tidak terkait.
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah meliputi:
 - a. Sifat hubungan;
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Selain amil membuat pengungkapan zakat, infak dan sedekah, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

2.1.4.5 Indikator Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Zakat no 109

Laporan keuangan Akuntansi Zakat menurut Pernyataan Standar Laporan Keuangan (PSAK) nomor 109, yaitu:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis. Laporan posisi keuangan amil menyatakan aset, kewajiban dan dana untuk penyajian kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya.

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyejikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dan dana infak/sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non-halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahik* sesuai ketentuan syariat.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infaq/sedekah lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak,

tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka waktu yang panjang. Laporan perubahan aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan, maupun tidak lancar untuk jenis dana dalam satu periode.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan dari ketiga pihak .

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

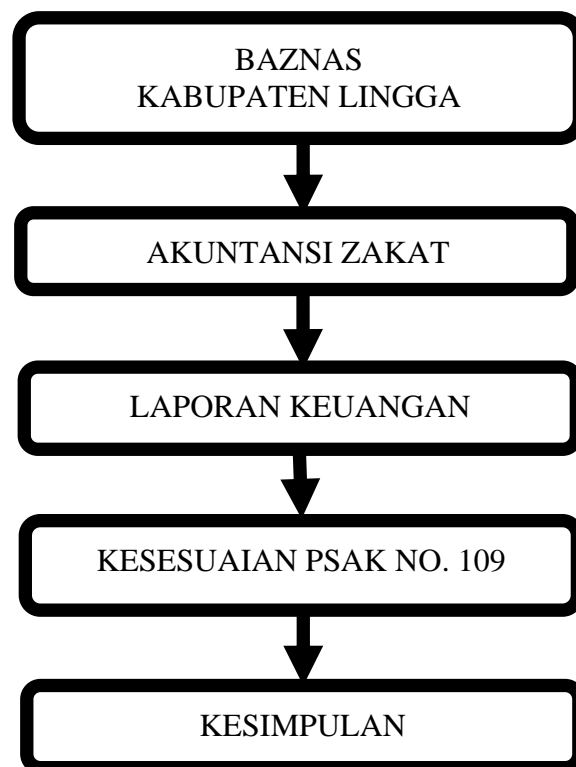
Laporan keuangan yang lengkap biasanya akan memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Lingga pada tahun 2015. Badan Amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga bergerak di lima bidang Program penyaluran zakat. Yaitu Lingga Dakwah, Lingga Ekonomi, Lingga Pendidikan, Lingga Kesehatan Dan Lingga Peduli. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga perlu menerapkan sistem akuntansi yang baik dalam melaksanakan berbagai program yang di lakukan dengan adanya perlakuan

akuntansi yang baik maka hasilnya juga akan menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian penelitian menggunakan PSAK NO. 109 yang akan menjelaskan tentang akuntansi zakat bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lingga sudah sesuai dengan PSAK NO. 109. Dengan demikian kerangka pemikirannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2020).

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Rosmawati rika, Nurhanasah neneng, 2011) yang berjudul ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) KOTA BANDUNG. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan akuntansi zakat di lembaga badan amil zakat (LAZ) Kota Bandung. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa :

- a. PSAK NO. 109 tentang Akuntansi Zakat dan infaq/ sedekah memuat laporan posisi keungan, laporan perubahan dana, laporan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
- b. Persamaan akuntansi zakat LAZ Kota Bandung yaitu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, sedangkan perbedaannya dalam hal kelengkapan komponen laporan keuangan.
- c. Implementasi akuntansi zakat pada LAS kota bandung sudah baik mengacu kepada PSAK NO. 109 meskipun belum sepenuhnya optimal.

Dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan LAZ Kota Bandung sudah sesuai dengan PSAK NO. 109, sedangkan

dari kelima LAZ kota Bandung yang menyajikan laporan keuangan lengkap dengan PSAK NO. 109 adalah pusat zakat umat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Pandapotan Ritonga, 2017) yang berjudul ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA. Penelitian ini dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan BAZNAS Sumatera Utara dan untuk mengetahui aplikasi zakat, infaq dan sadakah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntan Zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belumlah sepenuhnya menerapkan penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109.
3. Penelitian (Widhi, Pratama, Akuntansi, Ekonomi, & Unej, 2017) berjudul IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109. Dengan tujuan untuk mengetahui implementasi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 yang berfokus pada penyajian laporan keuangan yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak terdapat perbedaan dalam proses Akuntansi serta penyajian Laporan Keuangan yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Jember.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, Wardayati, & Sayekti, 2018) yang berjudul IMPLEMENTATION OF ZAKAT

ACCOUNTING IN AMAL ZAKAT INSTITUTE (LAZ) IN JAMBER (REVIEWED FROM ZAKAH SHARIAH : PSAK 101 AND PSAK 109). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi zakat di yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember di tinjau dari SAK Syariah. PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. hasil penelitian ini adalah bahwa hasil penerapan akuntansi zakat di LAZ YDSF Jember sesuai dengan pedoman PSAK 109 yang ditentukan untuk lembaga zakat dan pembutan serta pelaporan keuangan LAS YDSF Jember sudah lengkap dengan PSAK 101.

5. Penelitian (LATIEF, FITRY, 2019) dengan judul ACCOUNTING FOR ZAKAT AND INFAK (SADAQAH) AT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) IN NORTH SULAWESI, INDONESIA. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi untuk zakat dan infak (shadakah) dan menggambarkan prosedur dan implikasinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengumpulan zakat dari mustahik dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan membantu unit pengumpulan zakat sementara distribusi zakat dilakukan ke muzaki melalui beberapa program. Data dari muzaki dan mustahik dikumpulkan dan dimasukkan dalam aplikasi sistem informasi BAZNAS (SIMBA) dan kemudian di proses oleh aplikasi ini untuk menghasilkan laporan keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono 2012), penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono 2012) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut (J LEXY, 2017) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, motivasi, tindakan, Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini akan menggambarkan akuntansi zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga.

3.2 Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, peneliti mengambil data sebagai berikut :

1.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan (Sugiyono, 2015). Data primer diambil melalui wawancara dengan sejumlah pihak kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga.

1.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut(Sugiyono, 2015). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur, seperti buku, jurnal, laporan pengelolaan zakat tahun 2018 dan tahun 2019 , dan serta yang menunjang dan berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis dengan beberapa cara yaitu :

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memerikan jawaban atas pertanyaan untuk melakukan *interview*, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan saling terkait antara satu dengan yang lain (Rumengan, 2010). Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara kombinasi antara terstruktur dan tidak terstruktur.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan indera penglihatan. Observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat (Sugiyono, 2015).

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari *literature-literature* ilmiah(Sugiyono, 2015).

4. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang digunakan dapat berupa surat, catatan harian, dokumen pemerintah, data flasdisk, dan data yang tersimpan di website (Noor, 2011).

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara

yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya (Moleong, 2013). Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data,

penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2016) menyatakan Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sangat bersifat sementara, dan akan berubah bila di temukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan pengelolaan dan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar, S. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Belkaoui dan Ahmed Riahi. (2011). *Teori Akuntansi (Edisi Ke L)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Effendi, R. (2013). *Accounting Principles: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP (Edisi Revi)*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Harahap, S. S. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Edisi Ke satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hery. (2011). *Akuntansi (Aktiva, Utang dan Modal) (cetakan 1; Rudy, ed.)*. YOGYAKARTA: Gava Media.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. JL.Cempaka putih No.8 yogyakarta.
- IAI (Ikatan Akuntansi Keuangan). (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta jalan Sindanglaya No 1 Menteng.
- J Lexy, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. BANDUNG.
- Latief, Fitry, N. (2019). Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) At Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) In North Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/2655-6502>
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PASK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi (Edisi Ke-)*. Jakarta: Salemba.
- Nugraha, S., Wardayati, S., & Sayekti, Y. (2018). Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah: PSAK 101 And PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research (IJNTR)*, 4(1), 52–57. <https://doi.org/ISSN:2454-4116>
- Pandapotan Ritonga. (2017). Analisis Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1), 1–19.

- Rosmawati rika, Nurhanasah neneng, N. N. (2011). Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Zakat dan Infak/Sedekah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandung Rika Rosmawati, 2. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(109), 189–196. <https://doi.org/2460-2159>
- Siswanto, Dodik, nurhayati sri. (2015). *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*.
- Sugiyono (Ed.). (2015). *Metode Penelitian Manajemen* Bandung: ALfabeta.
- Suhadi, M. (2012). *Dahsyatnya Sedekah, Tahajud Dhuha & Santuni Anak Yatim*. (1st ed.). ZIYAD VISI MEDIA.
- Widhi, R., Pratama, B., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Unej, U. J. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Implementation of Accounting Zakat , Infaq and Shadaqah Based on PSAK 109. *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(109), 35–39.

CURICULUM VITAE



Nama : ERNI

Jenis Kelamin : Wanita

Tempat / Tanggal lahir : Dabo Singkep / 13 April 1990

Agama : Islam

Email : erniopal14@gmail.com

Alamat : Jl. Kota Piring Gg. Putri Riau IV Lorong IV

No Hp : 0821 7278 0565

Pendidikan : 1. SD Negeri 035 Lingga (2003)
2. SMP Negeri 04 Lingga (2006)
3. Paket C (2009)
4. STIE Pembangunan Tanjungpinang (2016-2020)